

## **ABSTRAK**

### **Analisis Bantuan Langsung Tunai Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu**

**Oleh**

**Sidratul Amaliah <sup>1\*</sup>  
Sri Wahyuni Mustafa <sup>2</sup>  
Zikra Supri <sup>3</sup>**

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palopo

Email : Sidratulamaliah@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bantuan Langsung Tunai terhadap pendapatan Masyarakat. Variabel penelitian ini adalah Bantuan Langsung Tunai dan Pendapatan Masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis uji t. Nilai Adjusted R sebesar 0.006 atau 0.06 % pembagian bantuan langsung tunai di pengaruhi oleh pendapatan masyarakat sedangkan 99.94 % pembagian bantuan langsung tunai Desa Sampeang di pengaruhi oleh variabel lain. Hasil pengujian parsial (Uji t) antara bantuan langsung tunai terhadap pendapatan masyarakat menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.664 koefisien regresi sebesar 0,068 dan nilai (sig) sebesar 0,508 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pendapatan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pembagian bantuan langsung tunai.

**Kata Kunci :** Bantuan Langsung Tunai, Pendapatan

### ***ABSTRACT***

This study aims to determine the direct cash assistance to people's income. The variables of this research are Direct Cash Assistance and Community Income. The analytical technique used is simple linear regression analysis and hypothesis testing t test. The Adjusted R value of 0.006 or 0.06% of the distribution of direct cash assistance is influenced by community income, while 99.94% of the distribution of cash transfers in Sampeang Village is influenced by other variables. The results of the partial test (t-test) between direct cash assistance and community income show a t-count value of 0.664, a regression coefficient of 0.068 and a (sig) value of 0.508 which is greater than 0.05. So it can be concluded that people's income has no significant effect on the distribution of direct cash assistance.

**Keywords: Direct Cash Assistance, Income**

## **Pendahuluan**

Ekonomi ialah salah satu pondasi yang ada dalam kehidupan Manusia. Dapat di lihat dalam keseharian kehidupan yang ada pada masyarakat selalu bersangkutan dengan kebutuhan ekonomi. Adanya ekonomi dapat membantu kesempatan bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak lagi dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat mengandalkan dari pendapatan mereka. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena pada kenyataannya pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan. Pendapatan masyarakat dapat di golongankan dari kelas sosial masyarakat yaitu golongan bawah,

golongan menengah dan golongan atas. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai pendapatan yang di hasilkan. Kondisi perekonomian mereka masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dan stabil di lihat dari keseharian masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi pada awal tahun 2020 kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa telah terjadi penurunan pendapatan masyarakat selama masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil survei, bahkan penurunan terjadi di seluruh lapisan masyarakat dari bawah hingga atas. Dampak covid-19 lebih dalam ke masyarakat berpendapatan rendah, karena pendapatan mereka berkurang, maka pola konsumsi mereka berkurang sementara menengah ke atas hanya beberapa masyarakat yang mengalami penurunan.

Pada awal tahun 2019, pandemi covid-19 seperti yang

sudah di tetapkan oleh PBB pada bulan maret menyebar secara signifikan ke seluruh penjuru dunia Dengan dampak yang luar biasa besarnya, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak pandemi ini. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat sangat berpengaruh, karena di berlakukannya pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah di indonesia. Banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja di luar rumah terutama masyarakat yang kurang mampu (miskin), sementara pendapatan keluarga masyarakat banyak di peroleh dari aktivitas pekerjaan di luar rumah.

Desa Sampeang kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu merupakan salah satu Desa di

kabupaten Luwu yang mempunyai jumlah masyarakat yang cukup banyak. Dengan jumlah 1617 penduduk tentu memiliki beberapa problematika terkait dampak dari wabah penyakit ini. Adanya bayang-bayang penurunan pendapatan serta menurunnya ekonomi di akibatkan wabah semakin meningkatkan resiko banyaknya masyarakat yang miskin. Adapun upaya yang di lakukan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian di tingkat desa salah satunya adalah dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa merupakan anggaran yang di alokasikan secara langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak dari wabah ini di tingkat rumah tangga dan desa. Keunggulan dana desa menurut (Asmanto et al., 2020) dalam unit risetnya Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai

Desa diantaranya (i) alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (ii) dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, (iii) dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, (iv) tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, (v) dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, (vi) serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Pemerintah memberikan Bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 yang berasal dari dana desa. Dana desa dalam Peraturan Menteri Keuangan 205/

PMK.07/2019 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan pengelolaan dana desa yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 kemudian di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan 40/PMK.07/ 2020

besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa ditetapkan senilai Rp. 600.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat dan Rp. 300.000 untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam perkeluarga penerima manfaat. Prioritas penggunaan dana desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi covid-19, antara lain berupa kegiatan penanganan pandemi covid-19 berupa BLT desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat. Pemerintah wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT desa. Calon keluarga penerima manfaat BLT desa paling sedikit memenuhi kriteria : 1). Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan; 2). Tidak termasuk penerima bantuan

program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan kartu pra kerja.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia selama dua kali, yaitu tahun 2005 dan tahun 2008. Bantuan langsung tunai (BLT) mulai terlaksana melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008, tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran. Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah : 1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; 2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi; 3. Meningkatkan tanggung jawab

sosial bersama (Depsos, 2008). Menurut Wynandin Imawan (2008) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM telah menimbulkan kontroversi dan masalah baru. Jika ditinjau dari sisi waktu keluarnya payung hukum hingga pelaksanaan yang hanya dalam waktu singkat, sangat terasa kebijakan BLT terburu-buru dan dipaksakan, tidak mengherankan jika kemudian timbul banyak masalah antara lain belum adanya kesamaan pemahaman antara berbagai instansi pemerintah, media, maupun masyarakat. Sikap pelaksana program BLT dinilai kurang baik,

terlihat dengan banyaknya pemotongan dana BLT di tingkat desa, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama di satu wilayah, hal ini menyebabkan timbulnya pemerataan dana BLT, kriteria miskin yang tidak bisa diterapkan, sehingga muncul metode rebusan desa untuk menentukan daftar nominasi rumah tangga sasaran, dan adanya perilaku iri jika ada yang mendapat bantuan, walaupun sebetulnya dia tidak berhak atau tidak layak mendapat bantuan.

Pada saat ini kementerian keuangan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, kementerian sosial dan kementerian Koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan, untuk mendorong dan membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mempercepat penyaluran BLT desa. Langkah-

langkah tersebut di lakukan agar desa dapat segera menyalurkan BLT desa untuk membantu penduduk miskin atau tidak mampu dalam rangka menanggulangi dampak covid-19.

Menurut penelitian terdahulu selviana (2016), Dampak BLT terhadap kesejahteraan rakyat terlihat pada prioritas masyarakat miskin dimana prioritas penggunaan uang BLT paling utama adalah sembako. Hal ini menunjukkan bahwa BLT belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari BLT tersebut masih untuk kebutuhan dasar. Namun BLT tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu BLT tidak terpengaruh terhadap kinerja masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak bisa hidup jika hanya menggantungkan

penerimaannya pada BLT. Di satu sisi, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Dengan BLT, kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, akan sedikit tertutupi dengan adanya dana “Cuma-Cuma” yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut penelitian terdahulu harwidiansyah (2011) bahwa memang pada dasarnya BLT dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara. Program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada

perekonomian nasional. Program ini dapat dikatakan juga program yang bersifat insidental, artinya pada saat terjadi krisis baru program ini dijalankan.

mempengaruhi pendapatan masyarakat di masa pandemic.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan meneliti dengan judul “ analisis bantuan langsung tunai terhadap pendapatan masyarakat di desa sampeang kecamatan Bajo Barat kabupaten Luwu”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di rumuskan masalahnya adalah :

Apakah pembagian bantuan langsung tunai mempengaruhi pendapatan masyarakat di masa pandemi ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pembagian bantuan langsung tunai

## **Landasan Teori**

### **Bantuan Langsung Tunai**

Townsend (1979) mempelajari rumah tangga dan standar hidup penduduk kota di Inggris. Townsend mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut, "kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan, adat istiadat dan pemenuhan makanan yang biasanya diterima oleh masyarakat". Sumber daya ini tidak terbatas pada pendapatan tunai. Ini hanya mencakup aset modal seperti rumah yang ditempati dan dimiliki oleh keluarga serta aset lain selain rumah yang mereka tempati. Nilai manfaat suatu pekerjaan seperti subsidi dan nilai asuransi kerja, fasilitas kerja.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negara berkembang khususnya di Indonesia.

Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama kemiskinan. Maka pemerintah membuat kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut diantaranya adalah Bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin.

Bantuan Langsung Tunai merupakan implementasi dari

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) Dalam Rangka Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak. Program BLT-RTS dalam pelaksanaannya harus secara langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang dikategorikan sebagai RTS), mendorong tanggung jawab sosial bersama dan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang secara konsisten harus memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti akan merasakan beban berat akibat kenaikan harga BBM. Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM, oleh karena itu besarnya BLT diperhitungkan sebagai kenaikan biaya hidup masyarakat miskin akibat kenaikan

harga (inflasi) yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Dilihat dari program pemerintah, upaya pengentasan kemiskinan di negara Indonesia cukup menarik simpati masyarakat. Akibatnya, masyarakat umum memuji pemerintah atas program BLT. Tak heran jika kemudian masyarakat pada level kategori mampu juga menjadikan diri mereka sebagai sasaran BLT. Namun, program pemerintah ini dinilai kurang efektif. Bantuan ini setidaknya memiliki dua dampak positif, pertama, meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang pendapatannya di bawah rata-rata kebutuhan normal. Kedua, menyuntikkan dana ke daerah miskin untuk menghidupkan kembali daya beli yang sudah sangat rendah. Dalam hal pemberian BLT kepada masyarakat miskin tentunya ada syarat atau kriteria khusus, namun kenyataannya masih

ada oknum yang menyalahgunakan fungsi BLT. Fungsinya hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi masyarakat menggunakannya untuk hal-hal yang dianggap kurang penting, seperti tukang becak, biasanya uang BLT digunakan untuk membeli rokok dan ada juga yang digunakan untuk membeli pakaian atau sepatu. Maksudnya digunakan untuk kebutuhan yang dianggap kurang penting bagi kebutuhannya. Selain fungsi yang disalahgunakan, validitas data bagi masyarakat miskin pun diragukan sehingga berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Seringkali data untuk persyaratan ini dipalsukan, sehingga bukan lagi orang miskin yang menerimanya bisa jadi orang lain.

### **Bentuk Bantuan**

Konkretnya, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis sistem

ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral, antara lain melalui berbagai upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembangunan lapangan kerja, pembiayaan usaha mikro, menengah, koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan irigasi, pembangunan prasarana dan sarana dan infrastruktur pedesaan serta terkait dengan pengelolaan sumber daya alam lingkungan.

Program-program tersebut harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dimana penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, pada tahun 2005-2008 pemerintah mengadakan program bantuan rakyat. Program tersebut antara lain dana kompensasi BBM,

Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa uang tunai yang disalurkan langsung kepada masyarakat miskin pada tahun 2008..

### **Dasar Hukum Bantuan langsung Tunai (BLT)**

Adapun dasar hukum penetapan bantuan langsung tunai (BLT) berdasarkan Keputusan RI No. 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai untuk rumah tangga sasaran yang meliputi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin di seluruh wilayah Indonesia. Dengan dikeluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2008, maka instruksi Presiden nomor 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah

tangga miskin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran yang meliputi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak dengan ini mengintruksikan kepada :

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- d. Menteri Keuangan.
- e. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- f. Menteri Sosial.
- g. Menteri Dalam Negeri.

- h. Menteri Komunikasi Dan Informatika.
- i. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- j. Jaksa Agung Republik Indonesia.
- k. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- l. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- m. Kepala Badan Pusat Statistik.
- n. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- o. Para Gubernur.
- p. Para Bupati/Walikota.

**Syarat-syarat Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Keluarga fakir miskin di Indonesia sangat banyak dari yang benar-benar miskin sampai kepada yang mengaku miskin yang ingin mendapatkan bantuan. Karena banyaknya masyarakat yang miskin, maka perlu mengklafisikan agar bantuan tersebut benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat

yang membutuhkan. Departement Sosial (Depsos) mendefinisikan fakir miskin itu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk mememnuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan/orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Fakir miskin ini mempunyai ciri-ciri yaitu keterbatasan atau kurangnya kemampuan ekonomi, keterampilan, pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan dan keadaan gizi keluarga, terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja serta keterbatasan akses dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Emil Salim, ciri masyarakat miskin adalah mereka tidak mempunyai faktor produksi, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah

karena waktu mereka tersisa untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan, kebanyakan mereka tinggal dipedesaan dan mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak didukung keterampilan yang memadai, pada umumnya pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian tempat berteduh dan lain-lain. Pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, orang yang untuk keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain. Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifa, dimana miskin lebih banyak /sangat membutuhkan daripada fakir.

Berdasarkan gambaran diatas, maka pemerintah menetapkan kriteria penerima BLT untuk rumah tangga sasaran yaitu rumah tangga sangat miskin, Rumah tangga

miskin dan rumah tangga hampir miskin, 14 kriteria sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
3. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, air danau atau air hujan.
6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.

7. Bahan bakar yang di gunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang atau minyak tanah.
8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu memberi pakaian baru satu stel.
10. Makan dalam sehari hanya satu atau dua kali.
11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
12. Pekerjaan utama kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan setenah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp. 600.000 ribu perbulan.
13. Pendidikan tertinggi yang di tamatkan kepala rumah tangga

bersangkutan tidak lebih dari SD.

14. Tidak memiliki harta senilai Rp. 500.000 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor, tanah, atau barang modal lainnya.

Selain 14 poin di atas, anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, POLRI, pensiunan PNS/TNI/POLRI, maka keluarga tersebut tidak berhak menerima BLT. Namun kriteria yang telah di tetapkan oleh pemerintah mengandung pro dan kontra terhadap realita yang terjadi di lapangan.

### **Mekanisme Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Adapun tahap penyaluran BLT meliputi :

- a. Pendistribusian kartu kompensasi.
- b. PT. Pos indonesia bertugas membuat/mencetak kartu kompensasi sesuai data yang di berikan oleh Biro Pusat Statistik

dan mengirimkan kartu kompensasi yang telah di cetak langsung ke alamat Biro Pusat Statistik kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

- c. Biro Pusat Statistik Kabupaten/Kota membentuk tim pendistribusian di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan, masing-masing di fasilitasi oleh Bupati/walikota dan camat. Tim di tingkat kecamatan terdiri dari petugas Biro Pusat Statistik, aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan di bawah pengawasan Biro Pusat Statistik kabupaten/kota dan Biro Pusat Statistik provinsi.

Penyaluran dana BLT dilakukan oleh petugas PT Pos bertugas untuk :

- Melakukan penyaluran dana BLT sesuai dengan penerima BLT sesuai Kartu kompensasi dan melakukan supervisi, monitoring dan pengawasan khusus yang berkaitan

dengan penyaluran BLT Rumah tangga sasaran.

## **Pendapatan**

### **Pengertian Pendapatan**

Menurut Sukirno (2000) pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang di miliki oleh sector rumah tangga dan sector perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa,bunga serta keuntungan atau profit (Hendrik, 2011). Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Definisi lain dari

pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahunnya atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat oleh karenanya setiap orang yang bergelut dalam suatu jenis pekerjaan tertentu termasuk pekerjaan sector informal atau perdagangan berupaya selalu meningkatkan pendapatan dari hasil usahanya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan sedapat mungkin pendapatan yang diperoleh dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang di peroleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala

pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Dalam kamus besar bahasa indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan dalam kamus manajemen adalah uang yang di terima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan adalah jumlah yang di bebaskan kepada langganan barang atau jasa yang di jual. Pendapatan adalah aliran masuk aktivas atau pengurangan utang yang di peroleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada

para pelanggan. Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. Arus masuk aktvita atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban etentitas atau kombinasi dari keduanya dari pengirim barang, pemberian jasa atau aktvitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung (suroto, 2000).

Pendapatan merupakan suatu unsur yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu usaha karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang di peroleh selama melakukan usaha (sumitro joyohadikusumo, 1957) pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita dimana pendapatan perkpita menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi masyarakat. Kondisi seseorang dapat di ukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang di terima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Samuelson dan Nordhous, 2002). Definisi lain dari jumlah penghasilan yang di peroleh dari

hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang di hitung setiap tahun atau setiap bulannya. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu : pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi. Pembagian di atas berkaitan dengan, status, pendidikan dan keterampilan serta jenis pekerja seseorang namun sifatnya sangat relative (Endang Hariningsih dan Rintar Agus Simatupang, 2008).

Berdasarkan penggolongannya, badan pusat statistik (BPS,2014), membedakan pendapatan menjadi 4 golongan :

1. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan

rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan.

2. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan.

3. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan

4. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp. 1.500.000,00 per bulan.

### **Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan**

Pendapatan seseorang di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.

b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini di tentukan oleh penawaran

dan permintaan di pasar faktor produksi.

- c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

### **Sumber Pendapatan**

Pendapatan seseorang harus dapat di gunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber masyarakat terdiri dari :

- a. Di sektor formal berupa gaji dan upah yang di peroleh secara tetap dan jumlah yang ditentukan.
- b. Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tambahan seperti, penghasilan dagang, tukang, buruh dan lain-lain.
- c. Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang di terima , biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa :

- a. Pendapatan dari usaha, meliputi hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan.
- b. Pendapatan dari keuntungan sosial.

**Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Rumah tangga miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sampeang kecamatan Bajo Barat cukup banyak. Jumlah penduduk keseluruhan adalah 1.673 jiwa, sedangkan total masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2020 sebanyak 130 kepala rumah tangga. Untuk lebih jelas dapat di lihat table di bawah ini.

Sumber: Data penerima BLT desa Sampeang, Bajo Barat Tahun 2019

Pendataan terhadap rumah tangga yang layak menerima BLT dilakukan secara langsung oleh pihak dari Badan Pusat Statistik sehingga tidak ada peluang bagi

masyarakat maupun pemerintah desa untuk merekayasa, karena semua data terkait langsung di tangani oleh pemerintah kabupaten melalui Badan Pusat Statistik.

**Uji Validitas**

Berdasarkan hasil uji validitas variabel dengan beberapa pernyataan adalah sebagai berikut :

**Tabel**

**Hasil Uji Validitas Variabel (X)**

Bu tir	Nilai Corrected Item Total Correlation/r hitung	Sig .	Rta bel	Krit eria
1	0.472	0.00	0.02	Valid
2	0.491	0.00	0.02	Valid
3	0.351	0.00	0.02	Valid
4	0.611	0.00	0.02	Valid
5	0.526	0.00	0.02	Valid
6	0.496	0.00	0.02	Valid

sumber: Data yang diolah pada spss

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel (X) memiliki status valid karena nilai  $r_{tabel}$  (Corrected

item Total Correlation) > lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang sebesar 0.202.

### Tabel

#### Hasil Uji Validitas Variabel (Y)

Bu tir	Nilai Corrected Item Total Correlation/r hitung	Sig .	Rta bel	Krit eria
1	0.523	0.00	0.202	Valid
2	0.569	0.00	0.202	Valid
3	0.370	0.00	0.202	Valid
4	0.541	0.00	0.202	Valid
5	0.492	0.00	0.202	Valid

sumber: Data yang diolah pada spss

Berdasarkan Tabel 4.4 maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel (Y) memiliki status valid karena nilai  $r_{tabel}$  (Corrected item Total Correlation) > lebih besar dari  $r_{tabel}$  yang sebesar 0.202

#### Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan yang dinyatakan Reliabel. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pernyataan selalu

konsisten. Metode yang digunakan adalah metode Cronbach's Alpha. Perhitungan dilakukan dengan dibantu computer program SPSS. Adapun reliabilitas untuk masing-masing variabel hasilnya sebagai berikut ini.

### Table

#### Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Cronbach's alpha	standar kriteria	Kriteria
1	Bantuan Langsung Tunai	0.371	0.60	Reliabel
2	Pendapatan Masyarakat	0.242	0.60	Reliabel

Sumber : data yang di olah pada

ssps

Berdasarkan table 4.3 uji realibilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pernyataan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas pada Bantuan Langsung Tunai sebesar 0.371 dan pada Pendapatan Masyarakat sebesar 0.242 ternyata memiliki nilai "Alpha Cronbach"

lebih besar dari 0.60 yang berarti kedua instrumen ini dinyatakan reliable atau memenuhi syarat.

### **Analisis Regresi Linear Sederhana**

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui persamaan regresi linear sederhana dengan persamaan komputer SPSS versi 20.

**Tabel**

#### **Analisis Regresi Linear Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.006	1.656		11.475	.000
BLT	.053	.079	.068	.664	.508

Dependent Variable:

PENDAPATAN

Diketahui nilai constan (a) sebesar 19.006 sedangkan pendapatan (b/koefesien regresi) sebesar 0.053 sehingga persamaan regresi dapat di tulis

$$Y = a + bX$$

$$Y = 19.006 + 0.053X$$

Berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari table diatas sebesar 0.508 lebih besar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (X) tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat (Y).

#### 1. Koefisien Korelasi Deskriptif

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel – variabel independen, hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom Adjusted R Square, yang ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel**

#### **Korelasi Deskriptif**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.068 <sup>a</sup>	.005	-.006	1.25947

Predictors (Constant), BLT

1. Angka R yang didapat pada tabel adalah sebesar 0,068

artinya dengan angka tersebut berarti antara variabel pendapatan masyarakat dengan bantuan langsung tunai mempunyai korelasi yang sangat lemah.

2. Nilai adjusted R square = - 0,006 menunjukkan bahwa pengaruh variabel pendapatan masyarakat terhadap bantuan langsung tunai sebesar 0,06 % atau dengan kata lain 0.06 % bantuan langsung tunai dipengaruhi oleh pendapatan sedangkan sisanya 99,94 % dipengaruhi oleh variabel lain.

### **Uji Hipotesis**

#### **Uji Signifikan Uji T**

Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak.

$H_0$  = Tidak ada pengaruh BLT (X) terhadap Pendapatan Masyarakat (Y).

$H_a$  = Ada pengaruh BLT (X) terhadap Pendapatan Masyarakat (Y)

Untuk memastikan signifikan atau tidaknya variabel X terhadap variabel Y dapat melakukan uji hipotesis dengan membandingkan nilai Sig. dengan probabilitas 0.05 atau dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t table.

Hasil output SPSS adalah :

1. Jika signifikansi (Sig) lebih kecil < dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh Bantuan Langsung Tunai (X) terhadap Pendapatan Masyarakat (Y).
2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig) lebih besar > dari probabilitas 0.05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh Bantuan Langsung Tunai (X) terhadap Pendapatan masyarakat (Y).

## Table

### Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.006	1.656		11.475	.000
BLT	.053	.079	.068	.664	.508

Hasil pengujian parsial (Uji t) antara bantuan langsung tunai terhadap pendapatan dapat dilihat dari tingkat signifikansi. Hasil pengujian persial (Uji t) antara Bantuan Langsung Tunai terhadap Pendapatan masyarakat menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.664 koefisien regresi sebesar 0,068 dan nilai (sig) sebesar 0,508 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Bantuan Langsung Tunai tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Sehingga dapat di simpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil uji analisis bantuan langsung tunai terhadap pendapatan masyarakat

Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa pembagian Bantuan Langsung Tunai tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat di masa pandemi covid-19.

Dari hasil regresi linear sederhana bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai mempunyai hubungan yang lemah terhadap pendapatan masyarakat dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan korelasi (R) sebesar 0,068 yang berarti korelasi yang sangat lemah antara bantuan langsung tunai terhadap pendapatan masyarakat.

Untuk nilai Adjusted R sebesar 0.006 atau 0.06 % pembagian bantuan langsung tunai di pengaruhi oleh pendapatan masyarakat sedangkan 99.94 % pembagian bantuan langsung tunai

Desa Sampeang di pengaruhi oleh variabel lain. Hasil pengujian parsial (Uji t) antara bantuan langsung tunai terhadap pendapatan masyarakat menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.664 koefisien regresi sebesar 0,068 dan nilai (sig) sebesar 0,508 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pendapatan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pembagian bantuan langsung tunai tetapi dengan adanya pembagian BLT ini masyarakat di harap dapat menggunakan uang BLT dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhannya selama di masa pandemic.

Hal ini juga di dukung oleh penelitian sebelumnya oleh Dian Marini (2015), dampak penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak yang hasilnya menunjukkan bahwasanya 75 responden yang mendapatkan BLT tersebut ternyata hanya 21 responden yang benar-benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah responden yang tidak pantas untuk mendapatkan BLT ini semua di sebabkan karena 54 responden tersebut memiliki jumlah penghasilan yang lebih banyak dari 21 responden yang artinya pendapatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembagian BLT.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian analisis bantuan langsung tunai terhadap pendapatan masyarakat Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu dan berbagai uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dalam menyimpulkan bahwa :

Dari hasil regresi linear sederhana bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai mempunyai hubungan yang lemah terhadap pendapatan masyarakat dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan korelasi (R) sebesar 0,068 yang berarti korelasi yang sangat lemah antara bantuan langsung tunai terhadap pendapatan masyarakat. Nilai Adjusted R sebesar 0.006 atau 0.06 % pembagian bantuan langsung tunai di pengaruhi oleh pendapatan masyarakat sedangkan 99.94 % pembagian bantuan langsung tunai Desa Sampeang di pengaruhi oleh variabel lain.. Uji t antara bantuan langsung tunai terhadap pendapatan masyarakat menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.664 koefisien regresi sebesar 0,068 dan nilai (sig) sebesar 0,508 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pendapatan masyarakat tidak

berpengaruh signifikan terhadap pembagian bantuan langsung tunai.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat di ajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan pengkajian ulang terkait jumlah uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dicairkan terlalu sedikit.
2. Penulis menyarankan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tepat sasaran.
3. Mengingat hasil penelitian di Desa Sampeang menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat maka penulis berharap pemerintah dapat melakukan penelitian lagi sebagai pembanding.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma Suryani. (2010). *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Islam di Desa Sungai Sarik Kec. Kompar Kiri Kabupaten Kompar*. Skripsi. Pekanbaru
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1957). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta
- Emil Salim. (1982). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- Endang hariningsih, Rinta Agus Sipatupang. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Enceran*. Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta. Hal 25-40
- Harwidiansyah. (2011). *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Macinni Baji kecamatan Bajing Kabupaten Gowa*. UIN Alauddin Makassar
- Hendrik Van Denberg. (2001). *Economic Growth and Development*.
- Imawan, Wynandin. (2008). *Pendatan Program Sosial PPLS 2008*. Bappenas, Jakarta.
- Junaidi dan Kariono. (2013). *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur*. Universitas Sumatra Utara, Vol 3, No. 1
- Mardiana. (2012). *Fenomena Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Kota Pekanbaru. Sosial Ekonomi Pembangunan*, 5, 130–143.
- Mira Hayu. (2019). *Peranan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Wonokorto*

- Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara. Universitas Muhammadiyah Palopo*
- Munir Dullah. 2010. *Peranan Bantuan Langsung Tunai Dalam Meningkatkan Daya Beli Keluarga Miskin di Kecamatan Sendana Kota Palopo*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi <https://www.solopos.com/prioritas-bantuan-langsung-tunai-desa-di-masa-pandemi-covid-19-1097341> Subject: Prioritas Bantuan Langsung Tunai Desa di Masa Pandemi Covid-19. Date: Thu, 21 Jan 2021
- samuelsan dan Nordhaus. (2003). *Ilmu Makro Ekonomi*. McGraw-Hill. Media Global Edukasi.
- Sholeh Wibawah. (2010). *Pemetaan Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukaharjo*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno Sadono. (2000). *Makro Ekonomi Modern*, PT. Rasa Grafindo Persada: Jakarta.
- Suroto. (2000). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta. Gajah Mada University
- Retno Widaningsih. (2007). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai*. Pendidikan Ekonomi. Universitas Sanata Dharma
- Robert M. Townsend (1979). *Optimal Contracts Competitive Markets With Costly State Verification*.

Selviana. (2016). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol III, No 2

Suharno dan Endang Setiasih. (2006) Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin. *Eko Regional*. Vol 1, No 2